

ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

ALIF LUTHFI FAADHILLAH
NPP 31.0299

Program Studi Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan
email : alifluthfi123@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. H. Bahrullah Akbar, M.B.A, CIPM, CPA, CA, CSFA, CfrA.

ABSTRACT

Background (GAP): The opinion of the Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan) represents a form of accountability for the local government in carrying out its reporting. This determines the performance evaluation conducted by the local government, which in this case is the responsibility of the Bandar Lampung city government. **Objective:** The purpose of this study is to assess the quality of the financial statements of the Bandar Lampung City Government and to identify the internal and external factors that influence this. **Method:** The method used in this research is a qualitative descriptive method. Data collection was conducted using several methods, namely interviews, observation, documentation, and data analysis using the method developed by Miles and Huberman. **Results/Findings:** The research results indicate that the quality of the financial statements of the Bandar Lampung City Government, managed by the Regional Financial and Asset Management Agency, with consideration of existing internal and external factors, concludes that the presented reports are appropriate and accurate, with some notes that need regular improvements, such as proper administrative practices and adherence to regulations. **Conclusion:** The Department of Population and Civil Registration needs to improve updated information, online administration efficiency, infrastructure improvements, and pick-up and drop-off services to ensure more effective and equitable services for the community.

Keywords: Financial Reports of the Local Government, Quality of Financial Reports, Financial Management and Asset Agency

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pelaporan yang dibuatnya. Hal ini menentukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya tanggungjawab Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas laporan tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,

dokumentasi, dan analisis data menggunakan metode analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, menunjukkan bahwa laporan yang disajikan sudah sesuai dan benar. Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki secara berkala, seperti tata administrasi yang lebih baik dan kepatuhan terhadap aturan. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung secara umum sudah baik, namun tetap memerlukan perbaikan tertentu untuk menjaga konsistensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Dalam menyelesaikan permasalahan terkait laporan keuangan yang disajikan, peneliti menyarankan perlunya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan, peningkatan kerjasama antar organisasi perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen keuangan, serta perlunya sosialisasi yang teratur mengenai sarana dan prasarana pendukung.

Kata Kunci: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi telah menjadi momen bersejarah bagi Indonesia dalam usahanya memperbaiki tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Reformasi ini diwujudkan melalui upaya pembangunan yang mandiri dan terbuka terhadap kerjasama internasional, tanpa sikap anti asing. Salah satu langkah penting dalam reformasi adalah penerapan otonomi daerah, yang merupakan respons terhadap keinginan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, distribusi pendapatan, dan pemberdayaan yang lebih baik. Menurut Wasistiono dan Polyando (2017), konsep desentralisasi ini melibatkan pemberian kewenangan kepada unit-unit di bawahnya untuk membuat keputusan melalui pendelegasian otoritas dalam struktur organisasi (Amin Insani et al., 2023).

Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terbaru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan-aturan ini memberikan kewajiban, hak, dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat secara mandiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan yang merata (Hafizi & Amalia, 2022).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus selaras dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Menurut Kaho (2005), pemerintah pusat tetap memiliki otoritas untuk mengawasi daerah-daerah otonom guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak sistem pemerintahan. Salah satu aspek penting dalam hubungan ini adalah aspek keuangan, termasuk penggunaan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya lainnya, dan pelayanan

umum. Desentralisasi fiskal menjadi bagian penting dari otonomi daerah, yang melibatkan pengalihan tanggung jawab keuangan dan pengelolaan pembiayaan kepada pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat diperhitungkan secara moneter, serta kekayaan yang dimiliki daerah terkait hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi harus diikuti dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai kinerja yang baik (Wulandari et al., 2023).

Kota Bandar Lampung, sebagai pusat administrasi Provinsi Lampung, memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, budaya, dan ekonomi. Kota ini terbagi menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Dalam bidang fiskal, pemerintah kota didorong untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Pengelolaan keuangan yang baik dibuktikan melalui laporan tahunan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Pasal 2 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Kasmir (2013), tujuan laporan keuangan mencakup pemberian informasi tentang aktiva, kewajiban, pendapatan, biaya, perubahan dalam aktiva dan pasiva, serta kinerja manajemen.

Akuntabilitas dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaporan keuangannya. BPK, sebagai badan audit eksternal, berwenang memantau dan mengaudit operasi keuangan serta laporan akuntansi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, opini BPK dibedakan menjadi empat jenis: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini BPK untuk Kota Bandar Lampung dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan penurunan kualitas laporan keuangan, dengan tiga tahun terakhir memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Pramestiningrum & Iramani, 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Studi ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai data evaluasi, referensi, pendapat, dan dasar pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan di masa mendatang. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung".

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan langkah maju dalam desentralisasi kekuasaan dan peningkatan kemandirian daerah. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pengelolaan keuangan di berbagai daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kota Bandar Lampung mengalami penurunan kualitas laporan keuangan, terlihat dari opini yang diterima selama periode 2019-2022. Pada tahun 2019, Kota

Bandar Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pada tiga tahun berikutnya secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kesenjangan utama yang diidentifikasi adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan yang tinggi secara konsisten. Ini menunjukkan adanya masalah yang berkelanjutan dalam aspek-aspek tertentu dari pengelolaan keuangan, seperti transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, kecukupan pengungkapan informasi, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Selain itu, kendala internal dan eksternal juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor internal seperti kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan lemahnya sistem administrasi turut berkontribusi terhadap masalah ini. Faktor eksternal meliputi perubahan regulasi yang sering kali memerlukan penyesuaian cepat dari pemerintah daerah dan tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut dan memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan memahami dan mengatasi masalah-masalah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangannya, serta mencapai kembali opini WTP dari BPK di masa mendatang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dieksplorasi. Berikut ini adalah beberapa studi yang mengkaji berbagai variabel terkait dengan kualitas laporan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di berbagai wilayah Indonesia.

1. Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Kabupaten Lanny Jaya

Penelitian oleh Kogoya (2023) di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, mengkaji pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Dengan menggunakan metode kuantitatif dan analisis kausal, penelitian ini menemukan bahwa penatausahaan aset tetap memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada kontribusi dari penatausahaan aset tetap, kategorinya rendah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dinilai BPK (Kogoya, 2023).

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Provinsi Jawa Barat

Firmansyah dan Sinambela (2021) meneliti pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. Menggunakan berbagai metode analisis statistik seperti regresi linear sederhana, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini

menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang baik dalam memastikan laporan keuangan yang berkualitas (Firmansyah & Sinambela, 2021).

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Sumbawa

Abdurrohman (2019) meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Sumbawa. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan sampling jenuh, penelitian ini menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, baik secara individu maupun bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Abdurrohman, 2019).

4. Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Seram Bagian Barat

Penelitian oleh Leunupun, Persulesy, dan Souhuwat (2022) mengkaji pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan, namun sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menekankan bahwa efektivitas sistem akuntansi lebih penting dalam memastikan laporan keuangan yang berkualitas daripada sekedar pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan (Hanifah et al., 2019).

5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Garut

Penelitian oleh Hanifah, Harahap, dan Hidayat (2019) di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis dengan SPSS, menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (Hanifah et al., 2019).

6. Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu

Trinoviani (2022) dalam disertasinya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kota Bengkulu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas mutu informasi laporan keuangan sangat penting dan memiliki dampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Trinoviani, 2019).

7. Determinasi Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Penelitian oleh Fatasya dan Zulkifli (2022) di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengkaji determinan kualitas laporan keuangan di BPKAD setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan. Hal ini menekankan pentingnya pengendalian internal yang efektif dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah (Fatasya et al., 2022).

8. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Buton

Ridzal (2020) meneliti pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja di BPKAD Kabupaten Buton. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan (Ridzal, 2020).

9. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bogor

Penelitian oleh Slamet dan Irmadiani (2022) mengkaji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik penerapan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Slamet & Irmadiani, 2022).

10. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian terdahulu oleh Abdulkarim R. (2020) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pendapatan, beban dan aset, utang dan ekuitas, pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Abdulkarim, 2020).

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi, dan sistem akuntansi keuangan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka melalui perbaikan dalam sistem dan proses pengelolaan keuangan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengintegrasikan analisis multi-faktor yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi determinan utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu atau dua variabel, seperti sistem pengendalian internal atau kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini memperluas cakupan dengan mempertimbangkan kombinasi variabel-variabel yang relevan termasuk penatausahaan aset tetap, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang

bagaimana berbagai elemen tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Selain itu, kebaruan ilmiah juga terlihat dalam pendekatan metodologis yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan metode kuantitatif tradisional, tetapi juga mengintegrasikan analisis kausal dan penggunaan software statistik terbaru seperti SPSS versi 26.0. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dan reliabel. Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan di berbagai wilayah Indonesia dengan karakteristik yang beragam, seperti Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang memberikan wawasan kontekstual yang berharga dan dapat diadaptasi oleh daerah lain yang memiliki tantangan serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di berbagai daerah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tujuan pertama adalah untuk menilai tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kota Bandar Lampung, mengacu pada standar akuntansi dan regulasi pemerintah yang berlaku. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut, termasuk faktor-faktor internal seperti kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal, serta faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan infrastruktur teknologi. Ketiga, penelitian ini juga bertujuan untuk mengusulkan strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang telah diidentifikasi, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui analisis mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi BPKAD Kota Bandar Lampung untuk mencapai tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami laporan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020-2022. Pendekatan kualitatif memungkinkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitik tanpa menggunakan angka-angka. Neuman (2006) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mengembangkan teori selama proses pengumpulan data, memungkinkan fleksibilitas dan interaksi antara pencarian data dan pengembangan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan induktif, memungkinkan adaptasi dan analisis langsung di lapangan untuk memahami masalah yang muncul dari kondisi nyata (Murdiyanto, 2020).

Operasional konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang dapat diukur untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung. Konsep operasional ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan mengadaptasi indikator relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami dari teori Nurlan Darise (2008) (Haryono, 2023).

Sumber data dalam penelitian mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, sementara data sekunder meliputi dokumen resmi dari BPKAD yang relevan dengan topik penelitian (Rijali, 2019).

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik non-probability sampling, khususnya purposive sampling, untuk memastikan informan yang dipilih memiliki pemahaman yang relevan terkait masalah penelitian. Informan termasuk kepala BPKAD, kabid akuntansi, kabid anggaran, kasubid akuntansi dan pelaporan, serta staf bidang akuntansi.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara dan format observasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta menafsirkan hasil observasi dan wawancara dengan informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi partisipasi, wawancara campuran (terstruktur dan tidak terstruktur), dan dokumentasi. Observasi partisipasi memungkinkan peneliti untuk mengamati dan merasakan secara langsung aktivitas yang diamati di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan, dan menafsirkan data yang terkumpul. Peneliti menghubungkan fakta dan informasi dari berbagai sumber dalam bentuk narasi logis, yang memungkinkan untuk menyusun kesimpulan awal yang sementara sebelum memvalidasinya kembali. Model analisis data interaktif ini mendukung proses interpretasi yang holistik terhadap fenomena yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kualitas laporan Keuangan Pemerintahan Kota Bandar Lampung pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami kepada pengguna informasi.

Relevan

Laporan keuangan harus memberikan manfaat umpan balik yang berguna bagi pengguna, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak terkait dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah. Pemerintah Kota Bandar Lampung terlibat dalam menyusun laporan ini dengan

melibatkan berbagai bagian seperti anggaran dan pelaporan aset, untuk memastikan konsistensi dan relevansi informasi yang disampaikan.

Memiliki Manfaat Prediktif

Selain relevansi, laporan keuangan juga harus memiliki manfaat prediktif, yaitu kemampuannya untuk membantu pengguna dalam memprediksi kinerja keuangan di masa mendatang berdasarkan kinerja keuangan masa lalu. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan anggaran dan pengelolaan risiko.

Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan juga merupakan karakteristik yang krusial. Pemerintah Kota Bandar Lampung menekankan pentingnya penyusunan laporan tepat waktu, tidak lebih dari 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk memastikan informasi yang disajikan tetap relevan dan bermanfaat bagi pengambil keputusan.

Lengkap

Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap, mencakup semua informasi yang relevan dan detail mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa mereka menyusun laporan dengan mematuhi semua komponen yang diperlukan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi.

Andal

Keandalan laporan keuangan mencakup penyajian jujur dan dapat diverifikasi. Ini mencerminkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat dan dapat dipercaya, serta dapat diverifikasi oleh pihak yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pengawas lainnya.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang disusun oleh BPKAD telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan, dengan fokus pada relevansi, prediktif, ketepatan waktu, kelengkapan, dan keandalan informasi. Hal ini penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

3.2 Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berkualitas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam terwujudnya laporan keuangan berkualitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor ini menyoroti berbagai aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan.

Di bagian faktor pendukung, peneliti menemukan bahwa faktor internal yang signifikan termasuk keberadaan sistem akuntansi yang mendukung penyusunan laporan keuangan. Kepala BPKAD, Dr. Muhamad Nur Ram'dhan, menekankan pentingnya sistem dan prosedur yang jelas serta penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk memfasilitasi proses manajemen keuangan yang efisien. Hal ini mencakup monitoring real-time, analisis data akurat, dan pelaporan yang efisien, yang semuanya berkontribusi pada kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Lampiran 2, hal. 117).

Selain itu, kehadiran tenaga ahli dan pengembangan karyawan melalui pelatihan berkelanjutan juga merupakan faktor pendukung yang krusial. Lena Hapriyanti, dalam wawancara pada 29 Januari 2024, menegaskan bahwa karyawan yang ahli di bidang akuntansi dan prosedur yang efektif untuk menyusun laporan menjadi fondasi yang penting (Lampiran 2, hal. 129).

Secara eksternal, kerjasama dengan badan pemeriksa keuangan dan lembaga audit lainnya, serta regulasi pemerintah pusat yang mendukung, juga turut membantu dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan sesuai aturan. Gunandar Syofrial, pada tanggal yang sama, menekankan peran penting kebijakan dan aturan dari pemerintah pusat dalam mendukung pelaporan keuangan yang jelas (Lampiran 2, hal. 123).

Di sisi lain, faktor penghambat juga tidak dapat diabaikan. Faktor internal seperti kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang konsisten, terutama dalam mengelola sistem SAP berbasis akrual, menjadi salah satu tantangan utama. Rotasi jabatan dan kurangnya kestabilan dalam komposisi tim juga memperlambat proses penyusunan laporan keuangan yang efektif. Andi Budiman menyampaikan bahwa tantangan ini sering kali muncul dalam pengelolaan keuangan di BPKAD (Lampiran 2, hal. 121).

Dari segi faktor eksternal, perubahan cepat dalam peraturan pemerintah pusat serta kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu dari pihak eksternal menjadi hambatan tersendiri. Gunandar Syofrial juga menyoroti betapa sulitnya menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang sering terjadi, yang secara langsung mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lampiran 2, hal. 124).

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, BPKAD Kota Bandar Lampung perlu fokus pada penguatan faktor pendukung seperti pengembangan SDM, peningkatan penggunaan teknologi informasi, dan memperkuat kerjasama dengan pihak eksternal. Sementara itu, mengatasi faktor penghambat seperti ketidakstabilan SDM dan perubahan regulasi perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan integritas dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hal ini akan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kota Bandar Lampung.

3.3 Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam meningkatkan Opini BPK

Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung (LKPD) dan memperoleh opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung telah melakukan sejumlah langkah strategis. Menurut Dr. Muhamad Nur Ram'dhan, M.Acc.,Akt.,AAP.,CA, kepala BPKAD, fokus utama mereka adalah memastikan keunggulan dalam bidang akuntansi, dengan memantau kinerja setiap pegawai secara cermat. Pendampingan dan pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan opini BPK yang masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabid Akuntansi, Andi Budiman,SE, menegaskan pentingnya menjaga kepatuhan dalam pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan memperbaiki kualitas SDM di semua bidang, terutama akuntansi, BPKAD Kota Bandar Lampung berharap dapat memperoleh hasil yang lebih baik pada evaluasi berikutnya.

Dalam konteks ini, Gunandar Syofrial, ST.,MTA, Kabid Anggaran BPKAD, menyoroti upaya peningkatan kemampuan SDM mereka. Melalui program pendampingan intensif, pelatihan in-house, dan kerjasama yang solid antarbagian, mereka berusaha memastikan bahwa semua pegawai memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aturan-aturan terkait pelaporan keuangan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi serta kualitas LKPD.

Secara keseluruhan, profesionalisme tinggi dan tanggung jawab yang kuat dari staf dan pimpinan BPKAD Kota Bandar Lampung menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Mereka berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan diri setiap tahunnya, menjadikan pengetahuan baru dan praktik terbaik sebagai landasan dalam operasional mereka.

Untuk memastikan kualitas LKPD yang lebih baik di masa depan, BPKAD Kota Bandar Lampung mengimplementasikan sejumlah strategi:

Pertama, mereka memberikan pendampingan dan pelatihan intensif kepada SDM, terutama mereka yang belum memahami sepenuhnya konsep akuntansi berbasis akrual. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu.

Kedua, komitmen pimpinan sangat diperlukan. Pemimpin di berbagai tingkatan harus mendukung dan mendorong penerapan standar yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini mencakup penerapan aturan yang ketat dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ketiga, perlu dibuat tahapan percepatan dalam penyusunan LKPD. Hal ini untuk mengantisipasi adanya keterlambatan yang mungkin terjadi dalam penyerahan laporan keuangan. Penyusunan yang cepat dan tepat waktu sangat penting untuk menghindari peringkat yang buruk dari BPK.

Keempat, sinergi antara semua pihak terkait di Kota Bandar Lampung menjadi kunci utama. Semua jajaran pemerintah daerah harus bekerja sama dan memiliki komitmen yang sama dalam mencapai visi dan misi mereka. Dengan sinergi yang kuat, mereka dapat memastikan bahwa semua sumber daya dan potensi di kota ini digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa Kota Bandar Lampung dapat terus meningkatkan kualitas LKPD mereka, memenuhi standar yang diharapkan oleh BPK, dan memberikan laporan keuangan yang transparan, akurat, serta dapat dipercaya bagi pengambil keputusan di tingkat pemerintahan dan masyarakat umum.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, temuan utama menyoroti kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Temuan tersebut mencakup beberapa aspek kualitatif yang menjadi fokus analisis, yaitu relevansi, prediktif, tepat waktu, lengkap, andal, serta dapat diverifikasi. Pertama, laporan keuangan dianggap relevan karena mampu memberikan umpan balik yang berguna bagi pengambil keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan semua perangkat daerah dalam penyusunan laporan tersebut, yang menjamin relevansi informasi yang disajikan. Kedua, laporan tersebut juga dinilai memiliki manfaat prediktif, memungkinkan pengguna untuk melakukan perencanaan dan prediksi kinerja keuangan masa depan berdasarkan data historis yang akurat. Ketiga, aspek ketepatan waktu dalam penyampaian laporan menjadi krusial, karena hal ini mempengaruhi nilai informasi yang disampaikan. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan tenggat waktu yang ketat untuk penyampaian laporan keuangan, yang diharapkan memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi. Keandalan dan kemampuan untuk diverifikasi merupakan karakteristik lain dari laporan keuangan ini, di mana proses audit dan pemeriksaan eksternal oleh BPK dan instansi terkait menjamin bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan realitas operasional dan transaksional Pemerintah Kota Bandar Lampung. Secara keseluruhan, temuan utama ini menegaskan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.5 Diskusi Temuan Menarik

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa temuan menarik yang patut diperbincangkan terkait laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Salah satu temuan menarik adalah tingkat kepatuhan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung secara konsisten menerapkan standar akuntansi yang

relevan dan mengikuti regulasi pemerintah dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Selain itu, temuan tentang transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berhasil meningkatkan tingkat transparansi dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik. Hal ini tercermin dari proses penyusunan laporan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta adanya upaya untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, temuan terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan juga patut diperhatikan. Penelitian menemukan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengoptimalkan proses penyusunan laporan keuangan dengan cara yang efisien, meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang baik dan memberikan kontribusi positif terhadap transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting terkait dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Bandar Lampung, berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan analisis data yang dilakukan. Pertama, meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian, terdapat catatan penting yang menyoroti perlunya perbaikan kualitas dalam penggunaannya.

Kendala utama yang dihadapi dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari internal maupun eksternal SKPD, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan bimbingan akuntansi secara berkala, perbaruan sistem secara bertahap, dan komitmen kuat dari pimpinan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung direkomendasikan untuk menerapkan sejumlah kegiatan dan program. Hal ini termasuk mempercepat penyusunan laporan keuangan, meningkatkan sinergi antar semua komponen dalam organisasi pemerintah daerah, serta menjalankan rekonsiliasi secara teratur sebagai bagian penting dari proses pembuatan laporan keuangan yang efektif. Kerjasama yang berkesinambungan dengan BPKP juga perlu ditingkatkan selama proses ini.

Saran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung termasuk pengembangan kemampuan dan kinerja SDM melalui pelaksanaan diklat yang diutamakan untuk pegawai dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang akuntansi. Sinergi antar BPKAD dan OPD juga perlu ditingkatkan dengan mendesak keaktifan dan memberikan sanksi tegas, serta meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung sistem yang baru.

Dengan implementasi saran ini, diharapkan Kota Bandar Lampung dapat memperbaiki kualitas laporan keuangannya secara signifikan, memenuhi standar yang diharapkan, dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat daerah.

Keterbatasan Penelitian. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ukuran sampel yang terbatas dapat mempengaruhi representasi keseluruhan dari populasi yang lebih luas. Selain itu, penggunaan data sekunder dari laporan keuangan yang telah disusun dapat membatasi kedalaman analisis dan menghadirkan potensi bias yang berasal dari cara data tersebut dikumpulkan atau dilaporkan. Selanjutnya, faktor waktu juga menjadi pertimbangan penting, karena analisis hanya mencakup periode tertentu yang mungkin tidak mencerminkan kondisi atau perubahan terbaru dalam praktik akuntansi atau kebijakan pemerintah. Keterbatasan lainnya meliputi ketergantungan pada informasi yang tersedia dan kemampuan peneliti untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk analisis yang lebih mendalam. Meskipun demikian, dengan memahami keterbatasan ini, penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menginterpretasikan praktik akuntansi serta kebijakan keuangan pemerintah daerah secara lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk mengembangkan penelitian ini ke depan, beberapa arah yang dapat dieksplorasi menjadi fokus utama. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat mengarah pada memperluas cakupan sampel dengan mengambil lebih banyak contoh dari Pemerintah Kota Bandar Lampung atau kota-kota lain untuk memperkuat generalisasi temuan. Selain itu, untuk meningkatkan kedalaman analisis, pendekatan kualitatif dapat digunakan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah terkait atau pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian masa depan dapat memperluas analisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, seperti dinamika politik lokal atau perubahan regulasi akuntansi yang mungkin mempengaruhi praktik pelaporan keuangan. Selain itu, mengintegrasikan pendekatan multidisipliner dengan memasukkan perspektif ekonomi, politik, atau sosial mungkin dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dampak laporan keuangan pemerintah terhadap kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, penelitian juga dapat mengembangkan kerangka teoritis yang lebih kuat atau model analitis untuk memprediksi atau mengevaluasi dampak dari kebijakan keuangan pemerintah secara lebih sistematis. Dengan mengeksplorasi arah-arahan ini, penelitian masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan berkelanjutan terhadap literatur tentang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,

bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, R. (2020). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 17(3). <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i3.958>
- Abdurrohman, H. (2019). Pengaruh Kompetensi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2). <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.306>
- Amin Insani, Rahayu, S., & Misni Erwati. (2023). DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1). <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>
- Fatasya, S. Al, Zulkifli, Z., & ... (2022). Determinasi Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ogan Komering Ilir. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah ...*, 1(10).
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2021). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. *LAND JOURNAL*, 1(1). <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i1.557>
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194>
- Hanifah, H. S., Harahap, E. F., & Hidayat, I. N. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 19.
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13.
- Kogoya, N. S. (2023). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan. *Repositori IPDN*.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Pramestinigrum, D. R., & Iramani, I. (2020). Pengaruh literasi keuangan, financial capital, kebijakan pemerintah terhadap kinerja usaha pada usaha kecil dan menengah di Jawa Timur. *Journal of Business and Banking*, 9(2). <https://doi.org/10.14414/jbb.v9i2.1750>
- Ridzal, N. A. (2020). PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN BUTON. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 6(1). <https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN

- KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BPKAD KABUPATEN BOGOR). *Public Service and Governance Journal*, 3(01). <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2792>
- Trinoviani, I. (2019). ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BENGKULU. *Asdaf*, 2(september).
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>

